DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jl. undata no. 7 Palu

# LAPORAN KINERJA

(LKj) TW I Tahun 2026

dkp.sultengprov.go.id | dkpprovsulteng@gmail.com

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Hidayah dan Rahmat-Nya, penulisan dan penyusunan ”**Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Triwulan I Tahun 2026”** dapat terselesaikan. Laporan ini merupakan bentu
k pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya penyelenggaraan *good governance*, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai pelaksana kegiatan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.

LKj ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai pencapaian kinerja yang dicapai Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak lain juga menunjukkan kinerja instansi sepanjang triwulan I Tahun 2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKj ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu, kritik dan saran membangun sangat diperlukan sebagai modal dasar perbaikan dan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di masa mendatang. Pada kesempatan ini pula kami mengaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Palu, 23 April 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

**Dr. YOPIE M.I. PATIRO, S.H., M.H**
**NIP. 19780525 199703 1 001**

# DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... ii
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... vi

BAB I. PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Gambaran Umum ..... 1
1.2 Permasalahan Utama/Isu Strategis ..... 25

BAB II. PERENCANAAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA ..... 29
2.1 IKU dan Perjanjian Kinerja ..... 29
2.2 CapaianKinerja ..... 32
2.3 Capaian Anggaran ..... 56

BAB III. PENUTUP ..... 72

Lampiran ..... 73

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Aset Tetap Per 31 Desember 2025 ..... 2
Tabel 2 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sulteng ..... 26
Tabel 3 IKU DKP Sulteng Tahun 2026 ..... 30
Tabel 4 Perjanjian Kinerja DKP Sulteng Tahun 2026 ..... 31
Tabel 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 32
Tabel 6 Capaian Kinerja Strategis..... 32
Tabel 7 Capaian Kinerja Program ..... 34
Tabel 8 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan ..... 38
Tabel 9 Capaian Anggaran triwulan I Tahun 2026..... 56

# DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi DKP Sulteng ..... 3

Gambar 2 Struktur Organisasi UPTD Balai Perbenihan Perikanan ..... 4

Gambar 3 Struktur Organisasi UPTD PMHP..... 4

Gambar 4 Struktur Organisasi UPTD PPKKP3K Wilayah I Hingga Wilayah VII ..... 5

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) triwulan I disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyebutkan bahwa dalam pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) komponen pelaporan kinerja, perangkat daerah harus Menyusun dokumen laporan kinerja secara berkala.

LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota setiap triwulan.

Dalam RPJMD 2025-2029 pembangunan kelautan dan perikanan terkait pada Misi 2 (dua) *"Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif melaui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan"* dan juga Misi 3 *"Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Berorientasi pada Konektivitas Antar Wilayah dan Antar Sektor*". Misi Kepala Daerah ini diterjemahkan kedalam program dan kegiatan yang tertuang didalam RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulteng 2025-2029.

Untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu dan sasarannya maka telah disepakati Perjanjian Kinerja antara Gubernur dan Pejebat Eselon II dalam hal ini Kepala DKP Sulteng. Kemudian pelaksanaan capaian kinerja DKP Sulteng dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) setiap tahunnya dengan cara pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan perikanan dan kelautan, maka DKP Sulteng pada tahun 2026 didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 251 orang personel yang terdiri dari PNS 174 orang dan PPPK 77 orang.

Selain SDM, DKP Sulteng juga didukung oleh sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Berikut disajikan rincian aset tetap DKP Sulteng per 31 Desember 2025.

Tabel 1. Aset Tetap Per 31 Desember 2025

| No | Uraian | Nilai (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanah | 35.108.468.080,00 | Bahwa asset tersebut berada pada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Undata No. 7 Palu dan UPTD Lingkup DKP Sulteng |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 55.397.823.002,00 | |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 100.887.198.091,42 | |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 59.904.437.161,24 | |
| 5 | Aset tetap lainnya | 1.139.821.321,00 | |
| 6 | Konstruksi dalam pengerjaan | 1.526.101.616,00 | |
| 7 | Akumulasi penyusutan | -69.256.579.368,80 | |
| JUMLAH | | 184.707.269.902,86 | |

Sumber : Subbagian Keuangan dan Asset DKP Sulteng (2025)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pada tahun 2016 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas. Berikut Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

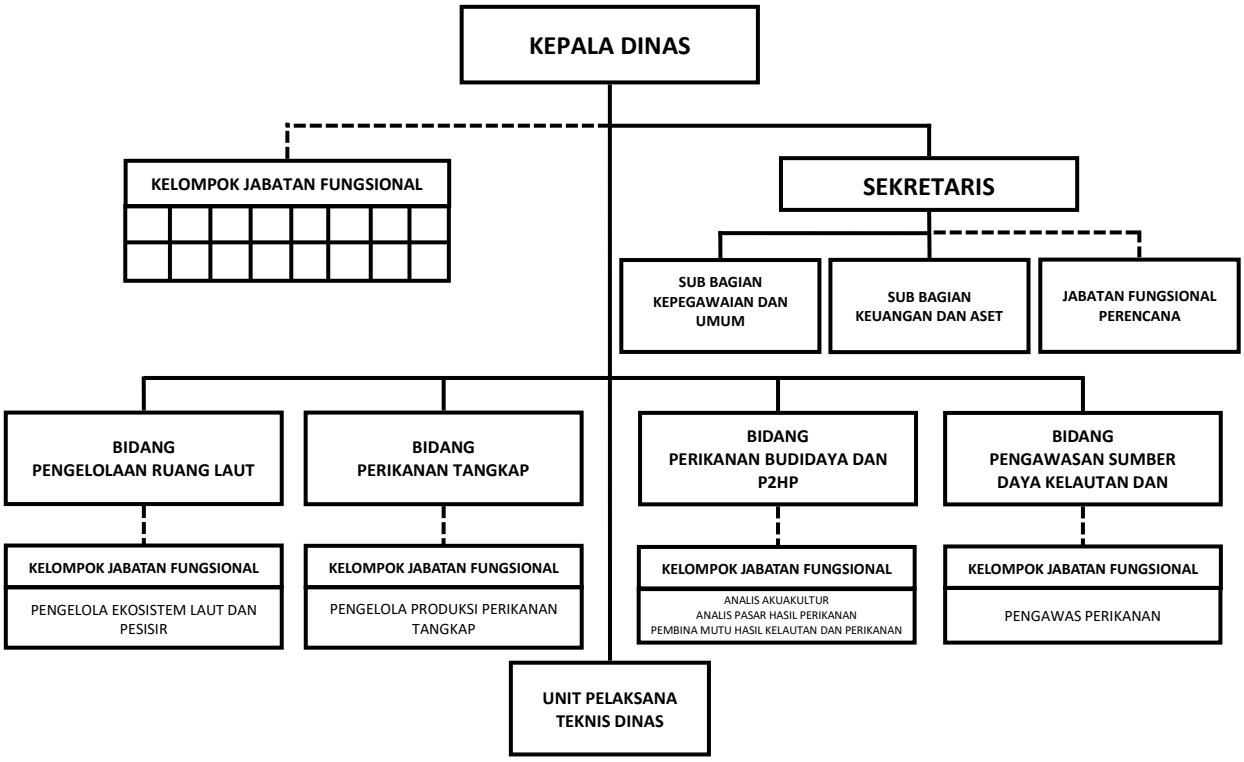


Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi DKP Provinsi Sulawesi Tengah

Sesuai Peraturan Gubernur nomor 26 tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas, terdapat 9 (sembilan) UPTD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu UPTD Balai Perbenihan Perikanan, UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP), UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I (PPKKP3K Wil. I), UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II ((PPKKP3K Wil. II), UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III (PPKKP3K Wil. III), UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV (PPKKP3K Wil. IV), UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V (PPKKP3K Wil. V), UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI (PPKKP3K Wil. VI) dan UPTD Pelabuhan Perikanan dan

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII (PPKKP3K Wil. VII).

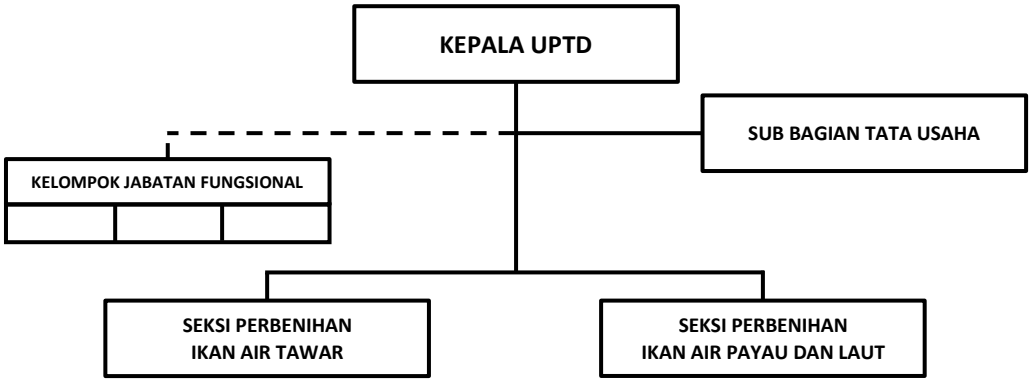


Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Perbenihan Perikanan

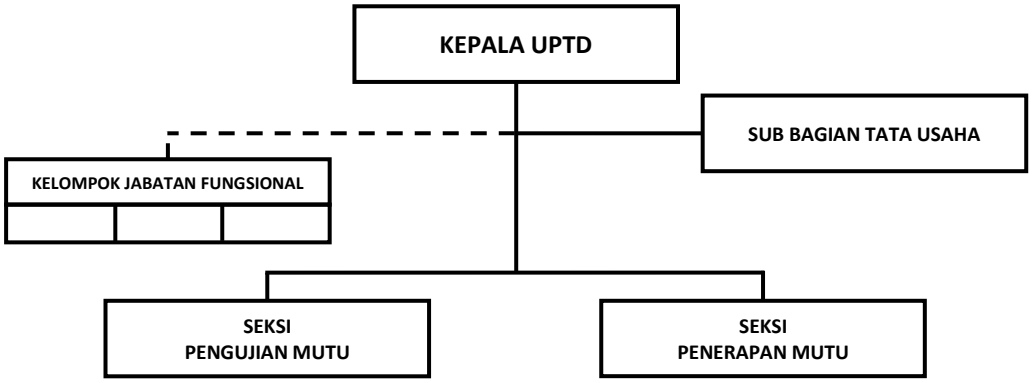


Gambar 3. Struktur Organisasi UPTD PMHP

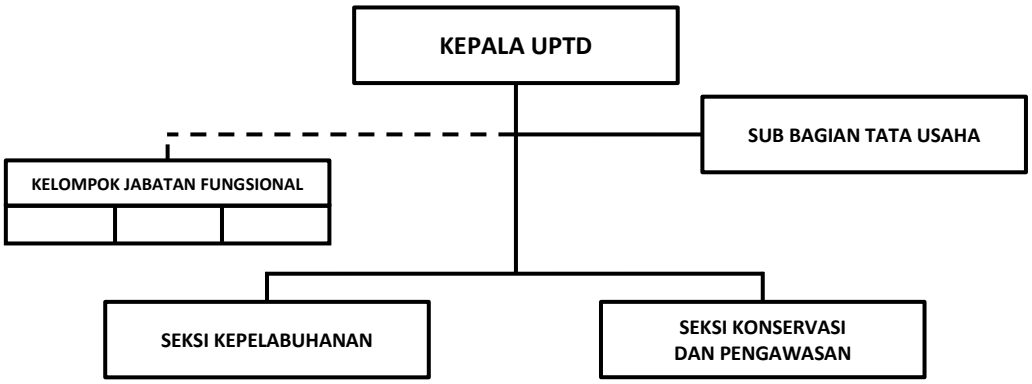


Gambar 4. Struktur Organisasi UPTD PPKKP3K Wilayah I hingga VII

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan, DKP Sulteng berpedoman kepada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, DKP Sulteng mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

4. Pelaksanaan administrasi dinas perikanan bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok dan fungsi sekretariat, masing-masing bidang/ UPT, subbagian, seksi, kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

**A. Sekretariat**

**Tugas :**

Melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, asset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

**Fungsi :**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
3. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai tugas dan fungsinya.

**a. Sub Bagian Keuangan dan Asset**

Bertugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan asset.

**Uraian Tugas** :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian keuangan dan aset;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan keuangan dan aset;
3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan asset dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
5. Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan asset;
6. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, asset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
7. Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
8. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
9. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan asset;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan aset serta Dinas.

**b. Sub bagian Kepegawaian dan Umum**

Bertugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

**Uraian Tugas** :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;

3. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
4. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri dan SKP;
6. Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan dan hukum;
7. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan;
8. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
9. Melaksanakan/ mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
10. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
11. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
14. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

**B. Bidang Pengelolaan Ruang Laut**

**Tugas** :

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut.

**Fungsi** :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang laut dan Konservasi Ruang Laut;
3. pengkoordinasian bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut dengan pihak dan unit terkait;
4. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut;
5. pelaksanaan tugas teknis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut;
6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi Ruang Laut;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Ruang Laut.

**C. Bidang Perikanan Tangkap**

**Tugas :**

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap.

**Fungsi :**

1. perumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
3. pengkoordinasian bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dengan pihak dan unit terkait;
4. pelaksanaan pembinaan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
5. pelaksanaan tugas teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Tangkap.

**D. Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP**

**Tugas :**

Membantu kepala dinas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dalam menyelenggarakan fungsi Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

**Fungsi :**

1. perumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
3. pengkoordinasian bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan pihak dan unit terkait;
4. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
5. pelaksanaan tugas teknis bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Logistik Hasil Perikanan, pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP.

**E. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

**Tugas** :

Membantu kepala dinas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap menyelenggarakan fungsi Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran.

**Fungsi** :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;
3. pengkoordinasian bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran dengan pihak dan unit terkait;
4. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;
5. pelaksanaan tugas teknis bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;
6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Perikanan Budidaya, P2HP, dan Penanganan Pelanggaran;
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.

**F. Kelompok Jabatan Fungsional**

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diturunkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah.

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
3) Pemberian Penugasan kepada kelompok jabatan fungsional diatur oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Ketua tim; dan b. Anggota tim.
5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
6) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## G. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

### I. UPTD Balai Perbenihan Perikanan

Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Balai Perbenihan Perikanan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis perbenihan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Urusan yang menjadi kewenangan UPT Balai Perbenihan Perikanan yakni menyelenggarakan perbenihan perikanan.

**Tugas :**

Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang perbenihan perikanan.

**Fungsi :**

1. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT Balai Perbenihan Perikanan;
2. Pelaksanaan pelayanan dan pengkajian teknologi di bidang perbenihan dan budidaya perikanan;
3. Pelaksanaan tugas teknis operasional/penunjang Dinas di bidang perbenihan perikanan; dan
4. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana perbenihan perikanan.

**a. Kepala UPTD**

Bertugas melakukan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang perbenihan ikan air laut dan payau serta perbenihan ikan air tawar.

**Fungsi:**

1. Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan perbenihan ikan air laut dan payau serta perbenihan ikan air tawar;
2. Pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Balai Perbenihan Perikanan;
3. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**b. Sub Bagian Tata Usaha**

Bertugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan, aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas.

**Uraian Tugas :**

1. melaksanakan penyusunan program Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD Balai Perbenihan Perikanan;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi Sub Bagian Tata Usaha;
3. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan perikanan;
4. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD Balai Perbenihan Perikanan;
5. melaksanakan publikasi data dan informasi UPTD Balai Perbenihan Perikanan;
6. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan aset meliputi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
7. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan Karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, rumah tangga, kebersihan dan keamanan;
8. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja terkait;

9. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD Balai Perbenihan Perikanan.

**c. Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar**

Bertugas menyiapkan bahan dan data, melaksanakan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, kajian teknologi dan tata laksana produksi serta bimbingan, penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air tawar.

**Uraian tugas :**

1. Melaksanakan penyusunan program Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar;
2. Melaksanakan pengelolaan Perbenihan Ikan Air Tawar;
3. Melaksanakan identifikasi, administrasi inventarisasi Seksi dan pengembangan sarana prasarana perbenihan ikan air tawar;
4. Melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
5. Melaksanakan kajian dan penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan ikan air tawar;
6. Melaksanakan pengelolaan induk unggul di bidang perbenihan ikan air tawar;
7. Melaksanakan produksi perbenihan pembudidayaan ikan air tawar;
8. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar dengan unit kerja terkait;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tata laksana produksi benih ikan air tawar;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar.

**d. Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut**

Bertugas menyiapkan bahan dan data, melaksanakan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, kajian teknologi dan tata laksana produksi serta bimbingan, penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut.

**Uraian tugas :**

1. melaksanakan penyusunan program Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut;
3. melaksanakan identifikasi, inventarisasi Seksi dan pengembangan sarana prasarana perbenihan ikan air payau dan laut;
4. melaksanakan kajian teknologi perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut;
5. melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut;
6. melaksanakan penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan ikan air payau dan laut;
7. melaksanakan pengelolaan induk unggul serta produksi perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut;
8. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut dengan unit kerja terkait;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tata laksana produksi benih ikan air payau dan laut;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut.

## II. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)

Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Urusan yang menjadi kewenangan UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan yakni menyelenggarakan penerapan mutu hasil perikanan.

UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas sebagai unsur penunjang sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pembinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan.

Untuk Melaksanakan tugas tersebut UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
2. pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
3. pelaksanaan Pelayanan Tugas teknis administrasi ketatausahaan pada UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan; dan
4. pelaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana penerapan mutu hasil perikanan.

### a. Kepala UPTD

Bertugas melakukan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasi dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan dibidang Penerapan Mutu Hasil Perikanan.

**Fungsi:**

1. Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis oprasional atas penyelenggaraan kegiatan di bidang Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
2. Melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan;

3. Melaksanakan Pengelolaan ketatausahaan dan kelompok Jabatan Fungsional.

**b. Sub Bagian Tata Usaha**

Bertugas menyiapkan bahan dan data, melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang ketatausahaan yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.

**Uraian Tugas :**

1. melaksanakan penyusunan program;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi Sub Bagian Tata Usaha;
3. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana penerapan mutu hasil perikanan;
4. memberikanan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
5. melaksanakan publikasi data dan informasi UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
6. melaksanakan pengelolaan keuangan, aset dan penyusunan anggaran UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
7. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan KARPEG, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Rumah Tangga, Kebersihan dan Keamanan;
8. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja terkait;
9. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. melaksanakan penyiapan bahan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan.

**c. Seksi Pengujian Mutu**

Bertugas menyiapkan bahan dan data penyelenggaraan kegiatan pengujian mutu.

**Uraian Tugas** :

1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian Mutu;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, aset dan penyusunan anggaran Seksi Pengujian Mutu;
3. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana Seksi Pengujian Mutu;
4. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian Mutu;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Seksi Pengujian Mutu;
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
7. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengujian Mutu.
8. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sistem jaminan mutu unit pengolahan ikan dan usaha kecil menengah;
9. melaksanakan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta sertifikasi produk
10. melaksanakan monitoring bahan kimia berbahaya pada produk hasil perikanan;
11. melaksanakan penerapan mutu hasil perikanan, bahan baku dan bahan penolong lainnya;

**d. Seksi Penerapan Mutu**

Bertugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi kegiatan Seksi Penerapan Mutu.

**Uraian tugas:**

1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerapan Mutu;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, aset dan penyusunan anggaran Seksi Penerapan Mutu;
3. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sistem jaminan mutu unit pengolahan ikan dan usaha kecil menengah;

4. melaksanakan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta sertifikasi produk;
5. menyiapkan bahan laporan hasil penerapan mutu produk perikanan;
6. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan penerapan mutu dengan unit kerja terkait;
7. monitoring dan evaluasi hasil kegiatan penerapan mutu;
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
9. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penerapan Mutu.
10. melaksanakan kajian teknologi pengolahan hasil perikanan;
11. melaksanakan pembinaan teknis penerapan teknologi produk olahan hasil perikanan;
12. melaksanakan pelayanan jasa produk olahan hasil perikanan bernilai tambah;

## III. UPT PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH DAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL WILAYAH I - VII

UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I - VII mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang pelabuhan perikanan dan kawasan konservasi pulau-pulau kecil pada wilayah I-VII.

**Fungsi :**

1. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I - VII;
2. Pelaksanaan pelayanan, pengendalian tata kelola dan pemanfaatan pelabuhan perikanan serta kesyahbandaran di wilayah kerjanya;
3. Pelaksanaan pelayanan dan pengkajian teknologi di bidang konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. pelaksanaan tugas teknis operasional/penunjang Dinas di bidang pelabuhan perikanan dan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

5. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang pelabuhan perikanan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

**a. Kepala UPTD**

Bertugas melaksanakan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

**Fungsi:**

1. perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, tata operasional pelabuhan perikanan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I-VII;
3. pembinaan pengelolaan ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**b. Sub Bagian Tata Usaha**

Bertugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan perlengkapan aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.

**Uraian Tugas :**

1. melaksanakan program;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi UPTD Pelabuhan Perikanan Kawasan dan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I-VII;
3. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;

4. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I-VII;
5. melaksanakan publikasi data dan informasi UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I-VII;
6. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan aset meliputi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
7. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan karpeg, kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, rumah tangga, kebersihan dan keamanan;
8. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja terkait;
9. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I-VII.

**c. Seksi Kepelabuhanan**

Bertugas Melaksanakan pelayanan teknis operasional pelabuhan, pengembangan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan.

**Uraian Tugas :**

1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kepelabuhanan;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi seksi Kepelabuhanan;
3. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana kesyahbadaran pelabuhan perikanan;
4. melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
5. melaksanakan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan, keberangkatan kapal perikanan serta surat persetujuan berlayar;

6. melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan, pemeriksaan dokumen aktifitas penangkapan ikan, dan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak di pelabuhan perikanan;
7. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian dan publikasi data produksi pendaratan ikan di pelabuhan perikanan;
8. melaksanakan kegiatan tata kelola dan pelayanan usaha di bidang kepelabuhanan perikanan;
9. melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan operasional, pengembangan dan kesyahbadaran pelabuhan perikanan;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan
11. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kepelabuhanan.

**d. Seksi Konservasi dan Pengawasan**

Bertugas Melaksanakan pelayanan teknis operasional konservasi kawasan dan pulau-pulau kecil.

**Uraian Tugas :**

1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Konservasi dan Pengawasan;
2. melaksanakan pengelolaan Administrasi Seksi Konservasi dan Pengawasan;
3. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Seksi Konservasi;
4. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan pelayanan perizinan di kawasan konservasi;
5. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengembangan kegiatan konservasi;
6. melaksanakan rehabilitasi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove;
7. melaksanakan perlindungan dan penangkaran terhadap ikan dan ataupun biota perairan yang langka, endemic, terancam punah, dan/atau dilindungi;

8. melaksanakan kegiatan pencadangan kawasan konservasi;
9. melaksanakan penyiapan dan pengolahan data statistik ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove serta jenis dan jumlah biota, kawasan ekosistem bahari serta sumber ekonomi alternatif di area pengelolaan kawasan konservasi, serta penyusunan data series kawasan;
10. melakukan identifikasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi kawasan konservasi;
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan; dan

melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Konservasi dan Pengawasan.

## 1.2 Permasalahan Utama/Isu Strategis

Dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan menghadapi berbagai dinamika permasalahan yang timbul. Permasalahan utama yang sering dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

Tabel 2. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

| Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD | Permasalahan PD | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Isu Lingkungan yang relevan dengan PD | | | Isu Strategis PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Sumberdaya kelautan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun sumberdaya lautnya yang besar | Kualitas SDM Pelaku usaha kelautan perikanan yang relatif rendah; | Peningkatan kualitas daya saing SDM, dan peningkatan layanan serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan (transformasi sosial). | Perkembangan demografi global | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja salah satunya karena *mismatch* antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan; | Kualitas Sumberdaya Manusia |
| | Kurang optimalnya fungsi Kelembagaan Pelaku Usaha; | Peningkatan kualitas dan daya saing sektor unggulan daerah, serta infrastruktur penghubung antar wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiskal (transformasi ekonomi). | Geo politik dan Geo ekonomi | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berlmalitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi | Masih tingginya tingkat kemiskinan dimana struktur tenaga kerja masih didominasi pada sektor pertanian dan menyumbang tingkat kemiskinan; | - Daya saing sub sektor kelautan dan perikanan<br>- Kebutuhan terhadap pangan akuatik (blue food) |
| | Penggunaan teknologi yang masih sederhana dan tradisional | | Perkembangan Teknologi | Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Tingginya ketimpangan antar kelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur daerah | |
| | Terbatasnya sarana prasarana dan infrastruktur kelautan perikanan yang memadai | | Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam | Perpindahan Ibu Kota Negara | Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana alam (gempa, tsunami, banjir dan | |

| Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD | Permasalahan PD | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Isu Lingkungan yang relevan dengan PD | | | Isu Strategis PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | untuk mendukung kedaulatan pangan pesisir | | | | likuifaksi) | |
| | Sistem Pendataan dan Informasi yang belum terintegrasi | | Perubahan Iklim | Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Tingginya ketimpangan antar kelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur daerah; | |
| | sulitnya akses terhadap induk, benih dan pakan murah berkualitas | | | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatal Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur | Sistem pendataan dan akses informasi yang masih terbatas | |
| | Keterbatasan BBM bersubsidi dan es | | | | | |
| | Penanganan Ikan di atas kapal dan pasca panen yang masih konvensional | | | | | |
| | Terbatasnya akses pemasaran dan permodalan bagi pelaku usaha kelautan perikanan | | | | | |
| | Masih maraknya IUU Fishing | Peningkatan ketahanan ekologi, mitigasi dan kemampuan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim | | | | Pengawasan SDKP dan Ancaman degradasi lingkungan |

| Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD | Permasalahan PD | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Isu Lingkungan yang relevan dengan PD | | | Isu Strategis PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan yang tidak seimbang | | | | | |
| | Daya S | | | | | |
| | Regulasi yang berubah-ubah | Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan | | | | Inkonsistensi Regulasi |
| | Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal | | | | | |

# BAB II
# PERENCANAAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA

## 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, lndikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah: (1) memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; (2) memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

IKU juga digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perencanaan jangka menengah; perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja (PK), pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah; serta pemantauan dan pengendalian kinerja (monev) pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Analisis dan monitoring evaluasi (monev) kinerja dilakukan dengan memperhatikan pencapaian IKU. Hal ini dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada pencapaian sasaran. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku baik melalui pengambilan data primer maupun sekunder termasuk melakukan sampling terhadap beberapa titik sampel.

Berdasarkan Visi dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maka untuk tahun 2025-2029 IKU pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai sebagaimana tersebut pada tabel berikut.

Tabel 3. IKU DKP Sulteng Tahun 2026

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan | 1. Nilai Tukar Nelayan (%) | $\frac{\text{indeks yang diterima nelayan}}{\text{indeks yang dibayar nelayan}} x\ 100$ | BPS Sulteng, Bidang Perikanan Tangkap, UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Wilayah I – VII | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah |
| | 2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (%) | $\frac{\text{indeks yang diterima pembudidaya}}{\text{indeks yang dibayar pembudidaya}} x\ 100$ | BPS Sulteng, Bidang Perikanan Budidaya & P2HP, UPTD Balai Perbenihan Perikanan | |
| | 3. Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th) | $\sum_{i=1}^{n} \frac{\text{KIDRT X WEIND}}{\text{JP}}$<br>Ket:<br>KIDRT = Konsumsi Ikan perKapita di rumah tangga (setara utuh segar)<br>WEIND = Penimbang Individu<br>JP = Jumlah Penduduk | Bidang Perikanan Budidaya & P2HP, UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Dinas Perikanan Kab/Kota | |
| 2. Terwujudnya Pengelolaan Kawasan SDKP yang Berkelanjutan | 4. Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan Terhadap Total Kawasan Perairan Teritorial | $\frac{kawasan\ lindung\ perairan + kawasan\ pemanfaatan\ ruang\ laut}{\text{total luas perairan teritorial}}$ | Bidang Pengelolaan Ruang Laut, UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Wilayah I – VII | |
| 3. Terselenggaranya Pengawasan SDKP berdsarkan regulasi yang berlaku | 5. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Peraturan Per UU (%) | $x = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left( \frac{c_i}{s_i} x\ 100 \right)}{\text{n}}$<br>Ket:<br>x = Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku<br>ci = Jumlah sampel pelaku usaha KP yang patuh<br>si = Jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa<br>i = Jenis komponen pelaku usaha KP<br>n = Jumlah komponen pelaku usaha KP | Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan | |

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang

disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen Perjanjian Kinerja DKP Sulteng dibuat setiap tahun sebagai suatu bentuk perjanjian kerja antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan pimpinan PD dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja DKP Sulteng Tahun 2026 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya yang didukung dengan program/kegiatan yang didanai oleh APBD dan APBN Tahun Anggaran 2026. Perjanjian Kinerja DKP Sulteng Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja DKP Sulteng Tahun 2026

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan | Nilai Tukar Nelayan (%) | 101,86 |
| | | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (%) | 101,54 |
| | | Angka Konsumsi Ikan (Kg/kap/th) | 43,40 |
| 2 | Terwujudnya pengelolaan kawasan SDKP yang berkelanjutan | Rasio pemanfaatan kawasan perairan terhadap total kawasan perairan territorial | 0,1804 |
| 3 | Terselenggaranya pengawasan SDKP berdasarkan regulasi yang berlaku | Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha KP Terhadap Peraturan Per UU (%) | 83 |

## 2.2 Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan suatu organisasi. Adapun yang menjadi penilaian kinerja adalah capaian kinerja strategis, kinerja program, kinerja kegiatan dan kinerja sub kegiatan pada triwulan I.

Pengukuran kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Penilaian capaian kinerja mengacu Permenpan RB No. 22 Tahun 2024, menggunakan predikat kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja

| NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) | PREDIKAT PKO |
|---|---|
| x > 100% | ISTIMEWA |
| 80% < x ≤ 100% | BAIK |
| 60% < x ≤ 80% | BUTUH PERBAIKAN |
| 20% < x ≤ 60% | KURANG |
| 0% ≤ x ≤ 20% | SANGAT KURANG |

### *a. Capaian Kinerja Strategis*

Keberhasilan tujuan dan sasaran diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tahun 2026, DKP Sulteng telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis (SS) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai, yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja Strategis

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target Tahunan | Target Triwulan I | Realisasi Triwulan I | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan | Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%) | 101,86 | 101,86 | 103,36 | 101,47 |
| | | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan NTPi (%) | 101,54 | 101,54 | 91,75 | 90,36 |
| | | Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th) | 43.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Terwujudnya Pengelolaan Kawasan SDKP yang | Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan terhadap total kawasan perairan territorial | 0.1804 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | berkelanjutan | | | | | |
| 3 | Terselenggaranya Pengawasan SDKP berdasarkan regulasi yang berlaku | Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Peraturan Per UU (%) | 83 | 83 | 100 | 120,48 |
| | **TOTAL CAPAIAN KINERJA STRATEGIS TRIWULAN I** | | | | | **104,10** |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan:

1) *Nilai Tukar Nelayan (NTN)*, pada triwulan pertama Tahun 2026 NTN menunjukkan angka yang baik karena melebihi target yang ditetapkan yakni 103,36 dari target 101,86 atau sebesar 101,47%. NTN di atas angka 100 dapat diartikan bahwa nelayan mengalami surplus (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha melebihi pertumbuhan pengeluaran rumah tangga).
2) *Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)*, pada triwulan pertama Tahun 2026 NTPi tidak mencapai target yang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan 101,54 dan terealisasi 91,75 atau sebesar 90,36%. Hal ini berarti harga yang dibayar kan oleh pembudidaya lebih besar dari harga yang diterima. NTPi di bawah 100 berarti pembudidaya mengalami defisit (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha di bawah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga).

3. *Angka Konsumsi Ikan (AKI)*, indikator ini dinilai pada akhir tahun anggaran.
4. *Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial,* indikator ini dinilai pada akhir tahun anggaran.
5. *Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan,* pada triwulan pertama Tahun 2026 capaian indikator ini melebihi target yang ditetapkan. Target sebesar 83 dan capaian 100 atau sebesar 120,48%. Selama triwulan I, sebanyak 26 pelaku usaha yang diperiksa ketaatannya dan semuanya didapati taat.

***b. Capaian Kinerja Program***

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, DKP Sulteng menetapkan 6 (enam) program yang akan dicapai, yakni (1) program penunjang urusan pemerintahan, (2) program engelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, (3) program pengelolaan perikanan tangkap, (4) program pengelolaan perikanan budidaya, (5) program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan (6) program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Capaian program dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Kinerja Program

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target Tahunan | Target Triwulan I | Realisasi Triwulan I | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekretariat | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan | Indeks Reformasi Birokrasi PD | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Bidang Pengelolaan Ruang Laut | | | | | | |
| 2 | Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil | Cakupan Wilayah Perairan dan Pesisir yang terkelola secara berkelanjutan (%) | 17,9882 | 0 | 0 | 0 |
| Bidang Perikanan Tangkap | | | | | | |
| 3 | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Produksi Perikanan Tangkap (ton) | 307.261,94 | 61.693,123 | 0 | 0 |
| Bidang Perikanan Budidaya & P2HP | | | | | | |
| 4 | Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya | Produksi Perikanan Budidaya (ton) | 427.291,76 | 94,400.00 | 84,709.57 | 89,73 |
| 5 | Meningkatnya serapan produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan | Produksi perikanan tangkap, budidaya dan olahan yang dikonsumsi (ton) | 124,610 | 31,05 | 0 | 0 |
| Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | | | | | | |
| 6 | Meningkatnya kepatuhan pelaku | Persentase pelaku usaha | 55 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | usaha yang diperiksa | yang diperiksa kepatuhannya (%) | | | | |
| | | Persentase Tertanganinya pelanggaran KP (%) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | Persentase POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (%) | 80 | 0 | 0 | 0 |
| UPTD Balai Perbenihan Perikanan | | | | | | |
| 7 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Meningkatnya PAD UPTD Balai Perbenihan Perikanan | PAD (Rp1.000) | 825,000.00 | 340.000,00 | 340.750,00 | 100,22 |
| UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan | | | | | | |
| 9 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Meningkatnya pelaku usaha KP yang menerapkan Standar Mutu Perikanan | Persentase pelaku usaha KP yang menerapkan Standar Mutu Perikanan (%) | 50 | 0 | 0 | 0 |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I | | | | | | |
| 11 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada UPTD | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Terkelolanya Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil | Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah I | 47 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Meningkatnya PAD | PAD (Rp1.000) | 1.096.854 | 274.213,5 | 100.758 | 36,74 |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II | | | | | | |
| 14 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada UPTD | Indeks Kepuasan Masyarakat | 85,80 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Terkelolanya Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil | Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah II | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Meningkatnya PAD | PAD (Rp1.000) | 1.033.500 | 258.375 | 41.085 | 15,90 |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III | | | | | | |
| 17 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada UPTD | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Terkelolanya Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil | Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah III | 56,50 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Meningkatnya PAD | PAD (Rp1.000) | 495.000 | 122.810 | 122.810 | 100 |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV | | | | | | |
| 20 | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil | Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah IV | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Meningkatnya PAD | PAD (Rp1.000) | 260.000 | 65.000 | 42.715 | 65,72 |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V | | | | | | |
| 23 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Terkelolanya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil | Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah V | 47 | 12 | 17 | 147,91 |
| 25 | Meningkatnya PAD | PAD (Rp1.000) | 1.099.728 | 393.685,6 | 98.421.400 | 37.104.000 |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Terkelolanya Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil | Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VI | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Meningkatnya PAD | PAD (Rp1.000) | 461.100 | 115.275 | 86.081 | 74,67 |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII | | | | | | |
| 29 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pada UPTD | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Terkelolanya Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil | Tingkat Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah VII | 63,50 | 6 | 6 | 100 |
| 31 | Terlaksananya pelayanan di Pelabuhan Perikanan | Persentase peningkatan pelayanan kepelabuhanan (%) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | **TOTAL CAPAIAN KINERJA PROGRAM TRIWULAN I** | | | | | **50,00** |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak semua program memiliki target pada triwulan I. Beberapa program hanya dapat dinilai persemester atau pertahun (pada akhir tahun anggaran). Berdasarkan target indikator program yang ditetapkan pada triwulan I maka capaian program sebesar 50,00%. Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah belum terkirimnya beberapa data dari kabupaten/kota, keterlambatan proses administrasi pada awal tahun dan beberapa alasan lain yang bersifat sangat teknis.

### *c. Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan*

Tahun 2026 DKP Sulteng menetapkan 15 (lima belas) program dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan yang akan dicapai. Capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan dirincikan sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

| No | SasaranKegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Tahunan | Target Triwulan I | Realisasi Triwulan I | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekretariat | | | | | | |
| 1 | Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 83,50 | 0 | 0 | 0 |
| | | Persentase capaian IKU Perangkat Daerah (%) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah | 75 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | 6 | 6 | 100 |
| 2 | Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | | Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah | 90 | 17 | 12 | 70,59 |
| | sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 438 | 438 | 438 | 100 |
| | sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nilai capaian | 65 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pelaksanaan pembangunan ZI | | | | |
| | | Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah | 65 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi | 84 | 84 | 86,22 | 102,64 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha | Persentase barang milik daerah yang dipelihara | 100 | - | - | - |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 48 | 12 | 12 | 100 |
| | sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bidang Pengelolaan Ruang Laut | | | | | | |
| 6 | Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Luas kawasan ruang laut sampai dengan 12 mil yang dikelola (Ha) | 739,291.71 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terlindungi (Ha) | 736.061 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Keg. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Milk di Luar Minyak dan Gas Bumi | Persentase Arahan Pemanfaatan Ruang Laut Dibawah 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang Difasilitasi (%) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha | Jumlah database perizinan berusaha yang dicatat atau didokumentasikan | 1 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Keg. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang terbina di WP3K (%) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | Sub kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman | Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bidang Perikanan Tangkap | | | | | | |
| 9 | Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Produksi Perikanan Tangkap Di Laut (ton) | 304.147,1 | 61.693.123 | 25.426 | 0,04 |
| | sub kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha PerikananTangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 300 | 50 | 0 | 0 |
| Bidang Perikanan Budidaya & P2HP | | | | | | |
| 10 | Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | Produksi budidaya ikan di laut (ton) | 37.1182,34 | 81.700 | 74,233.68 | 90,86 |
| | sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | Produksi budidaya ikan di darat (ton) | 56.109,42 | 12,700.00 | 10,475.89 | 82,49 |
| | sub kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana PembudidayaanIkan di Air Payau danAir Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Keg.Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala | Produksi Perikanan Olahan (kg) | 3.198.567 | 632.559 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Menengah dan Besar | | | | | |
| | sub kegiatan Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya saing (kegiatan) | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Rasio bahan baku industri pengolahan yang memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan pangan | 0,65 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi (unit usaha) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | | | | | | |
| 14 | Keg. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | Jumlah pelaku usaha Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yang diawasi (pelaku usaha) | 115 | 26 | 26 | 100 |
| | sub kegiatan Penanganan perkara | Jumlah perkara sanksi administratif | 20 | 5 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi | bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani | | | | |
| | sub kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha) | 10 | 2 | 2 | 100 |
| | sub kegiatan Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha) | 90 | 22 | 22 | 100 |
| | sub kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 15 | 2 | 2 | 100 |
| | sub kegiatan Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (kelompok masyarakat) | 20 | 5 | 5 | 100 |
| 15 | Keg.Pengawasan | Jumlah pelaku | 20 | 2 | 2 | 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sumber Perikanan di wilayah sungai, Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | usaha Kelautan dan Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diawasi (pelaku usaha) | | | | |
| | sub kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi | Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha) | 20 | 2 | 2 | 100 |
| UPTD Balai Perbenihan Perikanan | | | | | | |
| | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang | 1 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Disediakan (Laporan) | | | | |
| | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang dipelihara | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | Produksi benih (juta ekor) | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
| | | Produksi Budidaya (Kg) | 11.000 | 7.000 | 8.000 | 114,29 |
| | sub kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana PembudidayaanIkan di Air Payau danAir Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit) | 3 | 3 | 3 | 100 |
| UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan | | | | | | |
| | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pemeliharaan | Persentase barang | 100 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | milik daerah yang dipelihara | | | | |
| | sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Inovasi yang diterapkan (inovasi) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko (kegiatan) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I | | | | | | |
| | Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Realisasi APBD UPT | 97 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Administrasi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi | 1 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pelaksanaan Tugas ASN | Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | | | | |
| | Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang dipelihara | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%) | 55 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha) | 518.287 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penetapan dari Pemerintah Pusat | (WIL I) | | | | |
| | Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | Produksi ikan yang didaratkan (kg) | 1.649.630 | 412.407,5 | 150.316 | 36,45 |
| | sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (layanan) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II | | | | | | |
| | Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang dipelihara | 100 | 50 | 50 | 100 |
| | sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 10 | 5 | 5 | 100 |
| | Keg. Pengelolaan Ruang | Cakupan kawasan | 55 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%) | | | | |
| | sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha) (WIL II) | 66.702,053 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | Produksi ikan yang didaratkan (kg) | 2.025.965 | 506.491,25 | 202.660 | 40,01 |
| | sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (layanan) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III | | | | | | |
| | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pemeliharaan | Persentase barang | 100 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | milik daerah yang dipelihara | | | | |
| | sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%) | 55 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha) (WIL III) | 64.442,026 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | Produksi ikan yang didaratkan (kg) | 598.250 | 149.562 | 111.718 | 74,70 |
| | sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (layanan) | 9 | 3 | 3 | 100 |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV | | | | | | |
| | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 25 | 11 | 44,00 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Laporan) | | | | |
| | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang dipelihara | 100 | 25 | 25 | 100 |
| | Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%) | 55 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha) (WIL IV) | 22.430,69 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | Produksi ikan yang didaratkan (kg) | 1.542.462 | 385.615,5 | 202.710 | 52,57 |
| | sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (layanan) | 3 | 1 | 1 | 100 |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V | | | | | | |
| | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 97 | 24 | 18 | 75,30 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air | 1 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | | | |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang dipelihara | 97 | 24 | 2 | 7,18 |
| | sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%) | 55 | 13,75 | 17,38 | 126,40 |
| | sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha) (WIL V) | 32.505,21 | 8126,30 | 13.993 | 172,19 |
| | Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | Produksi ikan yang didaratkan (kg) | 518.767 | 129.691,75 | 17.196 | 13,26 |
| | sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (layanan) | 9 | 9 | 9 | 100 |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI | | | | | | |
| | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyelesaian kegiatan | 100 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | | |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang dipelihara | 100 | 25 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%) | 55 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha) (WIL VI) | 410.792,37 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | Produksi ikan yang didaratkan (kg) | 165.000 | 41.250 | 386.150 | 936,12 |
| | sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan | 4 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perikanan | Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (layanan) | | | | |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII | | | | | | |
| | Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyelesaian kegiatan pengadaan barang jasa melalui e-purchasing | 100 | 25 | 25 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyelesaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 25 | 25 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang dipelihara | 100 | 25 | 25 | 100 |
| | sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Cakupan kawasan konservasi yang terkelola secara keberlanjutan (%) | 6,54 | 0,65 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha) (WIL VII) | 16.849 | 1.684.9 | 0 | 0 |
| | Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | Produksi ikan yang didaratkan (kg) | 1.368.865 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (layanan) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | **TOTAL CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TRIWULAN I** | | | | | **63,64** |
| | **TOTAL CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN TRIWULAN I** | | | | | **76,47** |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak semua kegiatan dan sub kegiatan memiliki target pada triwulan I, beberapa hanya dapat dinilai persemester atau pertahun (pada akhir tahun anggaran). Berdasarkan target indikator kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada triwulan I maka capaian kegiatan sebesar 63,64% dan capaian sub kegiatan 76,47%. Sama dengan capaian program, beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target kegiatan dan sub kegiatan adalah belum terkirimnya beberapa data dari kabupaten/kota, keterlambatan proses administrasi pada awal tahun dan beberapa alasan lain yang bersifat sangat teknis.

***d. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja***

Pada triwulan I DKP Sulteng telah melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, akan tetapi dalam pelaksanaanya masih terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam pencapaian kinerja, secara umum digambarkan sebagai berikut:

1. Harga pupuk dan pakan yang relatif tinggi sedangkan harga jual hasil panen harus menyesuaikan harga pasar/konsumen sehingga menyebabkan kerugian bagi para pembudidaya,
2. Sebagian besar pembudidaya masih menerapkan teknologi konvensional dan belum menerapkan inovasi teknologi pada unit usaha budidaya,
3. Cuaca yang kurang menentu sehingga mempengaruhi hasil tangkapan dan budidaya,
4. Masih terbatasnya sarana prasarana dan inovasi teknologi penangkapan ikan yang dimiliki nelayan/kelompok nelayan.

## 2.3 Capaian Anggaran

Tahun 2026 DKP Sulteng mendapat alokasi anggaran (APBD) sebesar Rp62.072.586.813,52,- dan sampai dengan 31 Maret 2026, terealisasi sebesar Rp7.632.734.176,- atau sebesar 12,30%. Adapun rekapitulasi APBD yang diterima DKP Sulteng untuk belanja langsung tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Anggaran triwulan I Tahun 2026

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Pagu Anggaran Tahunan (Rp) | Target Triwulan I (Rp) | Realisasi Triwulan I (Rp) | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekretariat | | | | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 34,720,572,335.96 | 7,061,593,710 | 7,061,593,710 | 100 |
| | Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan | 13,500,000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | |
| | Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 33,798,259,115 | 6,998,489,389.00 | 6,998,489,389.00 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 33,798,259,115 | 6,998,489,389.00 | 6,998,489,389.00 | 100 |
| | sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 239,961,326.00 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 37,227,326.00 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12,000,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 190,734,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 596,766,561 | 63,104,321 | 63,104,321 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 425,796,561 | 54,741,001 | 54,741,001 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 170,970,000 | 8,363,320 | 8,363,320 | 100 |
| | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha | 72,085,334 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | 63,127,837 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Oprasional atau Lapangan | | | | |
| | sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8,957,497 | 0 | 0 | 0 |
| Bidang Pengelolaan Ruang Laut | | | | | |
| 2 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 1,061,988,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | 918,600,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | 918,600,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Milk di Luar Minyak dan Gas Bumi | 11,388,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha | 11,388,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 132,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Sub kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman | 132,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| Bidang Perikanan Tangkap | | | | | |
| 3 | Program Pengelolaan | 17,271,700,000 | 45,263,000 | 45,263,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Perikanan Tangkap | | | | 100 |
| | Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | 17,271,700,000 | 45,263,000 | 45,263,000 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 17,271,700,000 | 45,263,000 | 45,263,000 | 100 |
| Bidang Perikanan Budidaya & P2HP | | | | | |
| 4 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 1,980,381,963 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | 603,877,250 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | 603,877,250 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | 1,376,504,713 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1,376,504,713 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 288,174,000 | | | |
| | Keg.Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | 114,374,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta | 114,374,000.00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | | | | |
| | Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 173,800,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 173,800,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | | | | | |
| 6 | Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 1,185,146,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | 1,159,636,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi | 45,550,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | 881,250,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan | 76,396,000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | kewenangan provinsi | | | | |
| | sub kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | 44,920,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | 111,520,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg.Pengawasan Sumber Perikanan di wilayah sungai, Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 25,510,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi | 25,510,000 | 0 | 0 | 0 |
| UPTD Balai Perbenihan Ikan | | | | | |
| 7 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 800,603,380 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 792,803,380 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 488,416,684 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan | 304,386,696 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | |
| | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 330,132,684 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | 330,132,684 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 330,132,684 | 0 | 0 | 0 |
| UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan | | | | | |
| 9 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 168,091,844 | 19,118,489 | 19,118,489 | 100 |
| | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 161,641,844 | 19,118,489 | 19,118,489 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 107,564,624 | 19,118,489 | 19,118,489 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54,077,220 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 6,450,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6,450,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil | 84,644,300 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Perikanan | | | | |
| | Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | 84,644,300 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | 50,329,950 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | 34,314,350 | 0 | 0 | 0 |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah I | | | | | |
| 11 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 711,135,263 | 91,002,943 | 91,002,943 | 100 |
| | Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6,210,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 6,210,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 86,077,380 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan | 86,077,380 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Perlengkapan Kantor | | | | |
| | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 606,387,883 | 91,002,943 | 91,002,943 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 606,387,883 | 91,002,943 | 91,002,943 | 100 |
| | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12,460,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12,460,000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 15,350,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | 15,350,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | 15,350,000 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 66,210,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | 66,210,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | 66,210,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah II | | | | | |
| 14 | Program Penunjang Urusan Pemerintah | 600,752,041 | 54,231,259 | 54,231,259 | 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Daerah | | | | |
| | Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 538,514,041 | 54,231,259 | 54,231,259 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 460,514,041 | 54,231,259 | 54,231,259 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 62,238,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 62,238,000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 24,964,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | 24,964,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | 24,964,000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah III | | | | | |
| 17 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 444,741,375 | 89,716,789 | 89,716,789 | 100 |
| | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 371,473,375 | 89,716,789 | 89,716,789 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 358,198,704 | 89,716,789 | 89,716,789 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 13,274,671 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 73,268,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 73,268,000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 18,400,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | 18,400,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | 18,400,000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 55,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | 55,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi | 55,000,000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan | | | | |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah IV | | | | | |
| 20 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 444,424,131 | 28,119,754 | 28,119,754 | 100 |
| | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 256,639,040 | 28,119,754 | 28,119,754 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 256,639,040 | 28,119,754 | 28,119,754 | 100 |
| | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 185,285,091 | 0 | 0 | 0 |
| | Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 185,285,091 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 151,395,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | 151,395,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan | 151,395,000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah V | | | | | |
| 23 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 611,222,572 | 61,831,902 | 61,831,902 | 100 |
| | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 418,522,572 | 51,831,902 | 51,831,902 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 413,605,472 | 51,831,902 | 51,831,902 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4,917,100 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 192,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 192,700,000 | | | |
| 24 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 22,050,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | 22,050,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | 22,050,000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 134,930,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100 |
| | Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | 134,930,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | 134,930,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100 |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VI | | | | | |
| 26 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 419,223,367 | 52,317,744 | 52,317,744 | 100 |
| | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 265,723,367 | 52,317,744 | 52,317,744 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 253,929,067 | 52,317,744 | 52,317,744 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 11,794,300 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 153,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 153,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 20,820,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | 20,820,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | 20,820,000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 125,820,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan | 125,820,000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Perikanan Provinsi | | | | |
| | sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | 125,820,000 | 0 | 0 | 0 |
| UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah VII | | | | | |
| 29 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 84,714,558 | 45,337,967 | 45,337,967 | 100 |
| | Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 49,871,250 | 40,000,000 | 40,000,000 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 49,871,250 | 40,000,000 | 40,000,000 | 100 |
| | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 31,993,308 | 4,235,480 | 4,235,480 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25,993,308 | 4,235,480 | 4,235,480 | 100 |
| | sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2,850,000 | 1,102,487.00 | 1,102,487.00 | 100 |
| | sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2,850,000 | 1,102,487.00 | 1,102,487.00 | 100 |
| 30 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pemerintah Pusat | | | | |
| 31 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | Keg. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | **T O T A L** | **62,072,586,813.52** | **7,632,734,176.00** | **7,632,734,176.00** | **100** |

# BAB III
# P E N U T U P

Secara umum capaian kinerja pada triwulan I ini sudah cukup baik. Dimana capaian kinerja untuk sasaran strategis sebesar 104,10%, capaian kinerja program 50,00%, capaian kinerja kegiatan 63,64% dan capaian kinerja sub kegiatan 76,47%. Realisasi anggaran pada triwulan I sebesar Rp7.632.734.176,- atau 12,30%, ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada triwulan I.

Beberapa indikator sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan tidak tercapai, hal ini disebabkan karena sampai dengan penyusunan laporan ini data dari kabupaten/kota belum masuk. Nilai capaian tersebut diprediksi masih akan meningkat seiring dengan selesainya kegiatan pengumpulan dan penghitungan data.

*) Angka sementara

# L A M P I R A N

## Lampiran 1

# KEGIATAN-KEGIATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TRIWULAN I TAHUN 2026

**A. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

- Kegiatan Validasi Kelompok Calon Penerima Bantuan T.A 2026

**B. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

- Cpcl calon penerima bantuan kelompok budidaya perikanan Desa Diberi, kec. Marawola, kab. Sigi

**C. Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan**

- Kegiatan pengolahan ikan menjadi bakso dan kerupuk ikan

**D. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

- Kegiatan identifikasi calon penerima bantuan untuk kelompok tambak garam Talise Kota Palu

**E. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

- kegiatan pengawasan kapal perikanan di Kabupaten Poso dan kegiatan pengawasan budidaya perikanan di Kabupaten Tojo Una-una

**Lampiran 2**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. YOPIE M.I. PATIRO, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2026

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| GUBERNUR SULAWESI TENGAH | KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH |
| Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si | Dr. YOPIE M.I. PATIRO, S.H., M.H<br>Pembina Utama Muda<br>NIP. 19780525 199703 1 001 |

Dipindai dengan CamScanner

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| 1 | Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan | Nilai Tukar Perikanan | 101,86 |
| | | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan | 101,54 |
| | | Angka Konsumsi Ikan | 43,40 |
| 2 | Terwujudnya Pengelolaan Kawasan SDKP yang berkelanjutan | Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan terhadap total kawasan perairan territorial | 0,1804 |
| 3 | Terselenggaranya Pengawasan SDKP berdasarkan regulasi yang berlaku | Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Peraturan Per Undang - Undang | 83 |

| | Program | Anggaran (Rp.) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 37.953.739.079,52 | APBD |
| 2 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 12.871.836.168,00 | APBD |
| 3 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 1.549.156.434,00 | APBD |
| 4 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 690.472.000,00 | APBD |
| 5 | Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan | 345.146.000,00 | APBD |
| 6 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 264.018.300,00 | APBD |

Palu, 20 Februari 2026

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

**Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si**

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Dr. YOPIE M.I. PATIRO, S.H., M.H**
Pembina Utama Muda
NIP. 19780625 199703 1 001

Dipindai dengan CamScanner